



Gerakan Ekofeminisme Melawan Pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap 2 Indramayu (Tinjauan Perspektif Politik Rekognisi)

Cusdiawan ¹⁾, Oekan S. Abdoellah ²⁾, Firman Manan ³⁾

Universitas Padjadjaran
Jalan Bukit Dago Utara No.25, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat

Cusdiawan14001@mail.unpad.ac.id ¹⁾
Oekan.abdoellah54@gmail.com ²⁾
Firman.manan@unpad.ac.id ³⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis faktor yang menyebabkan perempuan di Desa Mekarsari melakukan gerakan sosial dari perspektif proses pembingkaihan. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan proses gerakan ekofeminisme di Indramayu dalam pembingkaihan pengakuan melawan Pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap 2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena yang diteliti dalam adalah proses interaksi ataupun pertarungan wacana yang memengaruhi kemunculan gerakan. Artikel ini berargumen bahwa ekofeminisme dalam kaitannya dengan politik rekognisi sebagai wacana penting dalam gerakan, karena dalam pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap di desa Mekarsari, bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, juga dianggap mengabaikan hak-hak para perempuan, baik dalam prosesnya maupun manfaatnya. Para perempuan memaknai pembangunan tersebut sebagai penghancuran produktivitas mereka. Sebab itu para perempuan melakukan perlawanan dalam bentuk gerakan sosial. Bagi para perempuan, memperjuangkan ruang hidup dan lingkungan, dimaknai juga sebagai perjuangan atas harga diri dan martabat. Artikel ini menemukan perbedaan makna dan kepentingan akan "pengakuan" bagi individu yang memilih terlibat di dalam gerakan dan yang menolaknya.

Kata kunci: ekofeminisme, gerakan sosial, pembingkaihan, pengakuan

Abstract

This study analyzes the factors that cause women in Mekarsari Village to carry out social movements from the perspective of the framing process. The purpose of this study is to describe the process of the ecofeminism movement in Indramayu in framing the confession against the Development of the Steam Power Company 2. This study uses a qualitative method, because what is examined in is the process of interaction or discourse struggle that affects the emergence of the movement. This article argues that ecofeminism in relation to the politics of recognition is an important discourse in the movement, because the development of the Steam Power Company in Mekarsari village, not only threatens environmental sustainability, it is also considered to ignore the rights of women, both in the process and in its benefits. The women interpret the development as the destruction of their productivity. For this reason, women took the fight in the form of social movements. For women, fighting for living space and the environment is also interpreted as a struggle for self-respect and dignity. This article finds differences in the meaning and importance of "recognition" for individuals who choose to be involved in the movement and those who reject it.

Key words: ecofeminism, framing, recognition, social movements

PENDAHULUAN

Pembangunan seringkali menysiasakan pihak-pihak yang tercecceer. Dengan kalimat lain, ada pihak yang tidak terakomodasi, bahkan mengalami marjinalisasi. Bagi kalangan ekofeminis, pembangunan yang dilakukan dalam Dunia Ketiga atau negara-negara berkembang yang diadopsi dari negara Barat, justru sering kali meminggirkan kaum perempuan dan menghancurkan produktivitas kaum perempuan. Kaum perempuan adalah entitas yang lebih mengalami kerugian sebagai dampak dari pembangunan. Pembangunan dengan mendasarkan pada logika pertumbuhan ekonomi, seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan (Shiva, 1997).

Fenomena di atas terjadi juga di Indramayu, yakni di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol yang menjadi tempat dibangunnya PLTU (Perusahaan Listrik Tenaga Uap) 2. Bagi sebagian warga sekitar, termasuk kaum perempuan, proyek PLTU lebih dimaknai sebagai proses yang semakin memarjinalisasikan mereka yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada pertanian, karena proyek PLTU 2 sendiri akan berdiri di lahan persawahan. Dengan kalimat lain, para kaum perempuan menganggap pembangunan PLTU 2 sebagai proyek yang akan menghancurkan produktivitas mereka. Berangkat dari kesadaran itu, para perempuan kemudian melakukan perlawanan dalam bentuk gerakan sosial dan tergabung dalam organisasi Jatayu (Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu). Bersama laki-laki, mereka aktif menyuarakan penolakan atas PLTU 2 yang rencana akan mulai dikonstruksi pada tahun 2022.

Charles Tilly dan Sidney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya-upaya yang bertujuan melakukan perubahan melalui interaksi yang mengandung perseteruan dan sifatnya berkelanjutan di antara warga negara dan negara (Tilly & Tarrow, 2007). Artikel ini menganalisis gerakan ekofeminisme dengan menggunakan perspektif proses pemingkaian. Paradigma proses pemingkaian mendasarkan analisisnya pada kajian psikologi sosial, sebagaimana yang dikembangkan oleh Bert Kladermans. Kladermans mengemukakan dua hal penting dalam proses pemingkaian, yaitu mobilisasi konsensus dan mobilisasi aksi. Kladermans sendiri berpendapat bahwa suatu partisipasi sosial ataupun politik akan dipengaruhi oleh aspek-aspek sikap (*attitudinal*) dan perilaku (*behavioural*) (Kladermans, 2005).

Adapun yang dimaksud sebagai mobilisasi konsensus yaitu pertarungan pemikiran yang bertujuan untuk memperoleh dukungan secara ideologis dari individu ataupun kelompok masyarakat, sementara mobilisasi aksi didefinisikan sebagai usaha untuk meyakinkan orang lain agar mau memberikan sumbangan secara nyata (praksis) bagi keberlangsungan atau kesuksesan gerakan sosial (Kladermans, 2005). Secara sederhana, kedua hal tersebut merujuk pada wacana ideologis dan praksis. Itu artinya, proses penyadaran ideologis agar individu-individu ataupun kelompok masyarakat memahami situasi yang tengah di hadapi mereka, juga agar individu-individu tersebut mau memberikan sumbangsih secara nyata, merupakan elemen penting dalam proses pemingkaian suatu gerakan sosial.

Penelitian ini menganalisis proses pemingkaian gerakan ekofeminisme di Indramayu dalam tinjauan rekognisi. Nancy Fraser melihat bahwa isu gender, meski di satu sisi dapat dikategorikan sebagai perjuangan redistribusi, namun bisa diposisikan juga sebagai perjuangan rekognisi. Secara sederhana, rekognisi bisa didefinisikan sebagai perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, dan dilandasi oleh semangat kultural (Fraser, 2005).

Ada berbagai studi terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, seperti jurnal yang ditulis oleh Aquarini Priyatna, Mega Subekti dan Indriyani Rachman yang berjudul "Ekofeminisme dan Gerakan Perempuan di Bandung" dalam *Patanjala* Vol 9 Nomor 3 Tahun 2017, yang berisi gerakan perempuan di Bandung dengan mendasarkan pada isu lingkungan (Priyatna et al., 2017). Studi lainnya, yaitu "Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah" yang ditulis oleh Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo dan dimuat *Jurnal Perempuan*, Vol.24 No.1, 2019, yang berisi pentingnya peran perempuan dalam pertanian (Susilowati & Ismoyo, 2019). Artikel selanjutnya, yaitu "Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi" yang ditulis oleh Andi Misbahul Pratiwi dan Abby Gina Boangmanalu dan dimuat *Jurnal Perempuan*, Vol.24, 2019, yang berisi

permasalahan serius dari perubahan sosial-ekologis terhadap perempuan, dan memaparkan peran agensi perubahan perempuan pedesaan (Pratiwi & Boangmanalu, 2019).

Adapun keunikan artikel ini adalah melihat peran agensi perempuan dalam mempertahankan ruang hidup dengan semangat ekofeminisme yang dibingkai dengan politik pengakuan. Perjuangan pengakuan di satu sisi, menjadi wacana penting dalam gerakan ekofeminisme. Akan tetapi pada sisi yang lain, kata “pengakuan” tersebut menjadi penghambat individu gerakan untuk melakukan mobilisasi, meskipun pengakuan dalam konteks yang kedua ini dimaknai dalam pengertian yang berbeda.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena salah satu kekuatan metode kualitatif sendiri yakni digunakan untuk meneliti proses interaksi (*looks at processes of interactions*) (Porta, 2014). Dengan demikian, metode kualitatif relevan digunakan dalam penelitian ini, karena berupaya menganalisis proses interaksi yang terjadi di antara individu yang terlibat dalam gerakan. Sementara itu, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, yakni studi kepustakaan, wawancara dan juga dokumentasi (Cresswel, 2009). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis model interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus (Miles & Huberman, 1992). Adapun teknik validitas data yang digunakan, yakni triangulasi sumber dan metode (Cresswel, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekofeminisme dalam Proses Pembangkitan Rekognisi

Pada tahun 2022, rencananya akan dibangun proyek PLTU 2 di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Rencana proyek tersebut mendapat penolakan dari sebagian warga lokal, karena lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut merupakan lahan produktif yang selama ini dijadikan warga untuk menggarap pertanian. Warga yang menolak PLTU 2 tersebut, kemudian mengorganisasi diri dan membentuk Jatayu (Cusdiawan, 2020).

Sebagian anggota Jatayu sendiri adalah kaum perempuan. Bagi para perempuan yang tergabung dalam Jatayu tersebut, proyek PLTU 2 akan mengancam ruang hidup mereka yang selama ini menggantungkan pada pertanian. Belajar dari pembangunan PLTU 1 yang berlokasi di tetangga desa mereka, yaitu Sumuradem, mereka menganggap bahwa PLTU hanya akan membawa dampak buruk bagi lingkungan. Dengan demikian, kehadiran PLTU 2 bukan hanya menghancurkan produktivitas mereka, melainkan juga mengancam kelestarian lingkungan. Alasan lingkungan tersebut didasarkan bahwa PLTU akan menghasilkan asap polusi dan dengan demikian dapat mengganggu kesehatan bahkan masa depan anak cucu mereka kelak. Mereka memandang bahwa perempuan akan menanggung beban lebih akibat pembangunan yang menghadirkan kerusakan. Melihat bagaimana para perempuan tersebut mengonstruksi wacana dan memaknai situasi yang mereka hadapi, dapat dikatakan bahwa ekofeminisme menjadi bagian dari konstruksi identitas yang dibangun dalam gerakan.

Dalam ekofeminisme, sebagaimana yang dirumuskan oleh Vandana Shiva, dikatakan bahwa pembangunan yang berwatak industrialis kapitalis Barat, hanya mementingkan kelompok tertentu dan merampas dari kelompok lain sehingga memperkokoh dan memperdalam proses kolonial yang merusak ekologi dan proses susutnya kendali politik atas sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi menjadi kolonialisme baru, yang merampas sumber daya dari mereka yang paling memerlukannya. Bedanya dengan kolonialisme dulu, sekarang kelompok elit nasional, bukan kekuasaan kolonial, yang merancang eksploitasi, dengan alasan untuk kepentingan nasional dan untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Eksploitasi tersebut diwujudkan dengan menggunakan berbagai teknologi pengurusan dan teknologi perusakan (Shiva, 1997). Dalam konteks gerakan di Indramayu, PLTU 2 yang didasarkan pada logika pertumbuhan ekonomi dengan jargon kepentingan nasional, diidentifikasi oleh para perempuan sebagai akar dari permasalahan.

Adapun individu-individu yang dimobilisasi dan tergabung dalam gerakan, kebanyakan adalah kaum buruh tani. Bagi mereka yang tergabung dalam gerakan penolakan PLTU 2 ini,

penolakan terhadap proyek pembangunan tersebut bukan hanya didasarkan karena pembangunan tersebut mengancam penghidupan sosial-ekonomi mereka, melainkan juga bagian dari usaha mereka untuk menjunjung harga diri dan martabat mereka. Mereka menganggap bahwa kehadiran mereka dieksklusi dengan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan PLTU 2 tersebut dianggap mengabaikan hak-hak mereka.

Menariknya, keteguhan mereka dalam menolak PLTU 2 ini berkaitan juga dengan harga diri. Mereka menganggap bahwa pertanian menjadi bagian dari identitas budaya dan sebab itu perlu untuk terus dilestarikan di desa mereka. mempertahankan identitas budaya bagian dari perjuangan untuk mempertahankan martabat. Sebab itu, pembangunan PLTU dapat menyebabkan rusaknya bangunan kultural di desa mereka.

Para perempuan menganggap pembangunan PLTU 2 sama sekali tidak memperhatikan nasib kaum perempuan. Bila tidak ada proyek PLTU 2, perempuan bisa ikut bekerja bertani. Lalu, ketika lahan pertanian dialihfungsikan untuk PLTU 2, mereka akan kehilangan mata pencaharian, mengingat terserap ke dalam pembangunan pun hampir tidak mungkin karena latar belakang pendidikan mereka yang kebanyakan hanya pada tingkat sekolah dasar bahkan tidak mengenyam pendidikan formal. Sebab itu, gerakan kaum perempuan ini, sebagai bentuk usaha mereka untuk lebih diakui keberadaannya dan apa yang disebut sebagai pembangunan harus memerhatikan nasib mereka. Dengan kalimat lain, pembangunan harus juga memerhatikan dan mengakui hak-hak mereka, termasuk hak atas lingkungan yang bersih, ruang hidup dan sebagainya. Pembangunan yang tidak sensitif gender, akan membawa dampak yang lebih merugikan bagi kaum perempuan.

Sebagai catatan, ekofeminisme memandang kedekatan perempuan dengan pertanian (Ponda, 2021). Dalam konteks gerakan di Indramayu, perempuan menginginkan adanya pengakuan akan hal tersebut. Bahkan, mereka mempunyai kesadaran, sebagaimana saat mereka memperingati hari Perempuan Internasional, bahwa kedaulatan pangan adalah masalah perempuan.

Meminjam pendapat Titiek Kartika, isu perempuan dengan kedaulatan pangan tentu beralasan, mengingat dalam konstruksi sosial, perempuan diposisikan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi makanan keluarga. Pemenuhan itu bukan hanya menyediakan makanan atau tidak, pemenuhan itu juga mencakup kultur pangan. Penyusutan bahan pangan dan air akibat polusi zat beracun, mengubah cara hidup seluruh keluarga dan komunitas. Perubahan dalam rangka penyesuaian itu ada di tangan perempuan. Secara tradisional kedaulatan pangan pada kenyataannya berada pada dominasi perempuan (Hendrastiti, 2019).

Dengan demikian, perjuangan ekofeminisme di Indramayu berupaya untuk mendapatkan pengakuan (rekognisi), mengenai pemenuhan hak-hak dan kekhasan identitas budaya mereka. Dalam pemahaman rekognisi Axel Honneth, absennya pengakuan menyebabkan adanya *disrespect*. Dalam ranah hukum misalnya, harus mampu menjamin kesetaraan termasuk untuk berkontribusi atau berpartisipasi dalam politik dan sebagainya. Ketiadaan rekognisi mengakibatkan suatu pihak tereksklusi dari kesetaraan (Honneth, 1995). Dengan demikian, ketiadaan pengakuan akan mengakibatkan suatu pihak terlukai, dan menyebabkan lahirnya perlawanan. Hal ini juga yang terjadi pada PLTU 2 di Indramayu.

Hal menariknya, masalah pertanian yang dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan menjadi bagian dari wacana pengakuan dalam gerakan, di satu sisi menjadi wacana dalam mobilisasi gerakan. Akan tetapi pada sisi yang lain, dalam pemaknaan yang berbeda, pertanian sebagai sarana untuk mendapat pengakuan pun menjadi penghambat mobilisasi. Masalah itu muncul, karena secara umumnya warga yang memiliki lahan persawahan di Desa Mekarsari bersedia menjual tanah mereka untuk proyek PLTU 2 tersebut. Motivasi awal warga yang bersedia menjual tanah mereka, salah satunya karena sebelumnya ada desas-desus, yang turut dimainkan oleh elite lokal pedesaan, bahwa tanah yang akan dibeli oleh negara dengan biaya tinggi, sehingga memungkinkan warga yang mempunyai sawah tersebut untuk membeli sawah yang lebih luas di desa lainnya. Sawah bagi masyarakat pedesaan, terutama dalam konteks artikel ini, berkaitan erat dengan simbol kekayaan. Artinya, semakin luas atau banyak sawah yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin memantapkan posisi status sosialnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai

“pengakuan” yang menghambat mobilisasi, karena motivasi dari para warga yang mempunyai sawah untuk semakin mendapat pengakuan dalam hierarki sosial, menyebabkan mereka sulit untuk dimobilisasi agar tergabung dalam gerakan proyek penolakan PLTU 2.

Untuk melihat keterkaitan antara lahan persawahan atau pertanian ini dengan budaya, baiknya menengok pendapat dari Sudrajat, pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, yang menyebut bahwa sawah mempunyai keterkaitan dengan dimensi budaya, salah satunya karena sawah bagi masyarakat pedesaan dianggap sebagai simbol kekayaan. Selain itu, sawah pun bisa menjadi sarana tumbuhnya rasa kebersamaan, yang terwujud dalam berbagai kegiatan sosial-budaya, seperti pemberantasan hama tikus, memperbaiki saluran air, upacara dan lain-lain (Sudrajat, 2015)

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, hal yang menarik, yaitu di samping sawah sebagai identitas budaya ini menjadi salah satu wacana penguat dalam proses *framing* yang dilakukan Jatayu, akan tetapi pada sisi yang lain juga menjadi penghambat. Hal itu dikarenakan karena status sawah sebagai simbol kekayaan tersebut yang kemudian menyebabkan para petani bersedia menjual tanahnya untuk proyek PLTU 2. Dalam prosesnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada desas-desus bahwa tanah yang dibeli negara untuk PLTU tersebut akan lebih mahal dari harga tanah pada umumnya, sehingga mendorong warga untuk menjual tanahnya dan mengandaikan dapat membeli sawah yang lebih luas di desa lainnya.

Adapun persoalan “harga diri” yang turut menjadi proses motivasi ini, didasarkan juga dengan adanya anggapan bahwa mereka para perempuan yang tergabung dalam Jatayu ini, sebagai warga negara, merasa tidak dihargai oleh negara. Perasaan itu muncul karena dalam proses perumusan kebijakan PLTU 2, para buruh tani tidak diikutsertakan dalam pembicaraan perencanaan rencana proyek tersebut, warga yang dilibatkan hanya mereka yang berasal dari kelas petani yang memiliki tanah. Padahal dampak dari kehadiran proyek PLTU 2 bukan hanya pada mereka yang memiliki tanah, juga mereka yang tidak memiliki tanah yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada pertanian, dan terutama persoalan kualitas lingkungan yang dampaknya akan dirasakan semua pihak.

Sebagai catatan, keyakinan kolektif yang dibentuk dan ditransformasikan sangat bergantung pada fakta bahwa keyakinan tersebut, menurut definisinya, saling dipakai bersama-sama. Jelasnya keyakinan kolektif tidak diciptakan oleh individu-individu secara sendiri-sendiri, melainkan melalui interaksi antarindividu. Di dalam pertukaran sosial tersebut, kejadian-kejadian dan informasi-informasi baru didiskusikan, diinterpretasikan dan dikomentari (Kladermans, 2005).

Bagi para perempuan yang tergabung dalam gerakan, ada dua tuntutan kongkret, dan ini menjadi solusi yang mereka harapkan atas situasi dan permasalahan yang mereka hadapi. Tuntutan tersebut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Tuntutan jangka pendek itu, yaitu meskipun sudah ada pembebasan lahan oleh negara, akan tetapi selagi bangunan PLTU 2 fisik belum berdiri di desa mereka mengingat pembangunan rencana dilakukan tahun 2022, warga menginginkan mereka tetap bisa mengakses lahan persawahan dan dikelola secara komunal. Apa yang menjadi tuntutan warga memang di luar ketentuan hukum. Sementara tuntutan yang bersifat jangka panjang, yakni dibatalkannya rencana proyek PLTU 2 di desa mereka. Bagi Jatayu, tanah seharusnya dikelola oleh rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukannya untuk proyek PLTU. Apa yang disebut sebagai pembangunan sendiri, tidak bisa dilakukan dengan memarginalisasikan suatu entitas tertentu, termasuk kaum perempuan. Para perempuan Jatayu menginginkan agar apa yang disebut sebagai pembangunan, turut menjamin kelestarian lingkungan, dan tidak menggusur ruang hidup perempuan dan keturunan mereka kelak. Pembangunan tidak bisa dilakukan tanpa keberpihakan pada orang-orang yang berasal dari kalangan bawah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi para perempuan Jatayu, protes mereka terhadap proyek pembangunan PLTU 2, bukan hanya untuk pembelaan atas kepentingan sosial ekonomi mereka sendiri, melainkan juga bagi keberlangsungan lingkungan dan generasi yang akan datang. Pembangunan tidak bisa memangkas apa yang seharusnya dimiliki oleh generasi yang akan datang, seperti lingkungan yang sehat dan sebagainya. Dalih

pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dianggap hanya untuk kepentingan para elite ekonomi dan tidak sensitif gender.

Dengan mendasarkan pada keyakinan-keyakinan sebagaimana yang dijelaskan di atas, para perempuan aktif dalam menyuarakan penolakan atas PLTU 2. Dari sekitar akhir 2015 hingga saat ini, mereka terlibat dalam berbagai aksi yang berkelanjutan. Adapun strategi mereka untuk memobilisasi individu agar tergabung dalam gerakan, yaitu dengan *door to door* atau mengunjungi warga-warga di desa mereka untuk menyebarkan gagasan dan pemaknaan mereka atas situasi yang mereka hadapi. Sementara untuk menyampaikan masalah mereka kepada publik yang lebih luas, yakni melalui website atau sosial media yang dilakukan oleh jejaring mereka, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WALHI, kemudian komunitas DOM (Dermayu Ora Meneng) dan lain-lain. Mereka pun memasang spanduk di jalanan desa mereka yang berisi penolakan atas PLTU 2 dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat desa mereka akan bahaya asap yang nantinya dikeluarkan oleh PLTU 2.

Selain itu, para perempuan melakukan penyadaran maupun menguatkan antar individu yang sudah tergabung dalam gerakan dengan aktivitas keseharian, seperti saat ke warung. Dengan demikian, mereka melakukan aktivitas penyadaran maupun penguatan justru dengan memanfaatkan tugas domestiknya dalam aktivitas keseharian. Para ibu-ibu pun berusaha menanamkan kesadaran kepada anak-anak mereka mengenai betapa pentingnya memperjuangkan lingkungan dan ruang hidup, sehingga mereka mengharapkan anak-anak mereka kelak dapat meneruskan perjuangan mereka kelak.

Kehadiran PLTU 2 sendiri jelas menghadirkan pro dan kontra di tengah masyarakat, yang justru berdampak pada retaknya modal sosial dalam masyarakat pedesaan di Mekarsari. Antar warga menjadi saling curiga dan bahkan menimbulkan keretakan sosial. Bagi warga yang mendukung proyek PLTU 2, yang bahkan sempat memasang poster dukungan mereka atas PLTU 2, menganggap gerakan penolakan PLTU 2 hanya untuk kepentingan segelintir kelompok yang memang mempunyai garapan sawah di sekitar proyek PLTU 2. Mereka yang pro PLTU 2 ini beranggapan juga, bahwa kehadiran proyek PLTU 2 dapat membuka kesempatan kerja bagi warga desa Mekarsari secara umumnya, mengingat proses pembangunannya pasti akan memerlukan tenaga-tenaga kasar yang berasal dari masyarakat lokal.

Adapun yang menjadi keresahan warga yang menolak PLTU 2 sendiri tentu sangat beralasan, terutama menyangkut persoalan ekologis, karena teknologi Batu Bara sudah banyak ditentang karena berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Penambahan suhu bumi yang diakibatkan dari meningkatnya emisi karbon yang dilepaskan oleh PLTU batu bara semakin memicu efek gas rumah kaca. Selain itu, berbagai emisi lain yang dihasilkan oleh PLTU batu bara akan menurunkan kualitas udara yang dihirup oleh publik. Hal tersebut berpotensi pada memburuknya kualitas kesehatan hingga peningkatan angka penderita penyakit saluran pernafasan (WALHI Jawa Barat, 2020). Hal tersebut, sejalan juga dengan yang dikemukakan para ahli, seperti Fred Magdoff dan Jhon Bellamy Foster, bahwa batu bara memang berkontribusi bagi pemanasan global (Magdoff & Foster, 2018).

Analisis psikologi sosial dalam proses pembingkaiannya ini membantu untuk menjelaskan mengapa sebagian orang berpartisipasi di dalam gerakan sosial, dan sebagian lainnya dalam situasi yang sama tidak ikut berpartisipasi. Mengapa seseorang mau berpartisipasi di dalam suatu bentuk aksi? Mengapa seorang individu mau mengambil sikap terhadap suatu kausa? Mengapa juga sebagian partisipan meninggalkan suatu gerakan sementara yang lainnya tetap bertahan? (Kladermans, 2005). Dalam konteks penelitian ini, kesadaran sebagaimana yang ditulis di atas itulah yang menyebabkan para individu mau tergabung ke dalam gerakan, menyumbangkan tenaga bahkan materi. Sebagai catatan, keperluan pendanaan bagi keberlangsungan organisasi dan aksi sebagian besar berasal dari iuran para anggotanya itu sendiri. Bahkan, ketika ada anggota laki-laki yang menghadapi masalah hukum, yakni insiden bendera terbalik pada tahun 2017 dan diproses pada 2018 yang diduga kuat kental akan nuansa kriminalisasi. Para anggota perempuan Jatayu bahu membahu membantu, baik



secara materil maupun moril , istri dari anggota yang saat itu tengah menghadapi masalah hukum untuk mencukupi keperluan keluarganya.

Pengalaman Perempuan dalam Berbagai Aksi Protes

Jatayu tercatat melakukan berbagai aksi penolakan PLTU 2, dan perempuan turut menjadi bagian di dalamnya. Perempuan-perempuan yang tergabung dalam Jatayu ini, bisa dikatakan mempunyai semangat militan yang tinggi. Adapun semangat militansi itu bisa terlihat, ketika melakukan aksi, mereka selalu berdiri di garda terdepan. Pada sekitar tahun 2017, Jatayu pun melakukan aksi protes karena saat itu ada kehadiran alat-alat berat untuk melakukan penimbunan tanah. Saat itu, ada insiden keributan yang melibatkan Jatayu selaku pihak yang kontra dengan pembangunan PLTU, dengan pihak yang pro terhadap proyek PLTU 2, yang dalam hal ini adalah kontraktor.

Contoh lain yang menunjukkan semangat militansi yang tinggi dari kaum perempuan, yaitu cerita seorang ibu, di mana ia tetap mengikuti aksi protes di berbagai tempat meski tengah dalam keadaan mengandung. Apa yang ditunjukkan olehnya tersebut, mengandung makna filosofis bahwa perjuangan yang ia lakukan saat ini bukan hanya untuk dirinya saja, melainkan untuk masa depan anaknya kelak. Uniknya, ketika sang ibu melahirkan, ia kemudian memberi nama pada anaknya yaitu "Jatayu". Dari pemberian nama saja menyiratkan bahwa ia mengharapkan anaknya kelak meneruskan perjuangan orang tuanya, yakni sebagai orang yang peduli terhadap isu lingkungan dan dapat dengan teguh memperjuangkannya.

Tercatat, perempuan dengan semangat ekofeminisme ini bersama anggota Jatayu laki-laki, pernah mengadakan aksi beberapa kali di depan DPRD Indramayu, seperti yang terjadi pada februari 2018 dan pada februari 2020. Bagi warga Jatayu, aksi protes yang mereka aspirasikan di depan DPRD, yang selanjutnya ada audiensi secara langsung tidak dapat memuaskan mereka. Pada aksi tahun 2018 misalnya, DPRD mengeluarkan pernyataan bahwa semua pihak harus menghormati putusan PTUN, dan DPRD hanya meminta pemangku kebijakan untuk menyiapkan kerja bagi warga yang terdampak kehadiran proyek PLTU 2 tersebut. Sementara pada aksi yang berlangsung pada 2020, Jatayu berkesempatan untuk ditemui secara langsung oleh ketua DPRD Indramayu, dan saat itu DPRD hanya mengatakan akan meninjau lokasi proyek PLTU 2 secara langsung.

Selain ke DPRD Indramayu, Jatayu pun pernah menggelar aksi di depan kantor Bupati Indramayu. Jatayu menilai dokumen terkait perizinan PLTU 2 tersebut cacat hukum. Di samping melakukan aksi jalanan, mereka pun menuntut secara hukum, dalam hal ini terhadap Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/Kep.51.A.-BLH/2015 tentang ijin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT PLN (Persero) unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Selain melakukan aksi di wilayah Indramayu, Jatayu pun melakukan aksi di Bandung, tepatnya di depan kantor UIP PJB I PLN, yang berlangsung pada 18 April 2018. Dalam aksinya tersebut, mereka menyuarakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait proyek PLTU 2 yang dinilai bermasalah. Selain itu, mereka pun menyampaikan agar tidak ada lagi tindakan-tindakan intimidasi dan kriminalisasi di lapangan, serta meminta pihak PLN mencabut pelaporan terhadap warga yang tetap melakukan penggarapan sawah di lahan proyek PLTU 2. Selain aksi-aksi tersebut, Jatayu pun melakukan aksi-aksi lainnya, bahkan ke Jepang hingga dua kali atas bantuan FoE (Friends of the Earth) Japan. Aksi ke Jepang ini didasarkan karena pemerintah Jepang turut membantu keberlangsungan proyek PLTU 2. Aksi yang mereka lakukan terus berlanjut hingga 2021 ini yang dilakukan di banyak tempat dan lokasi.

Aksi yang dilakukan oleh perempuan ini kerap menggunakan berbagai atribut simbol, seperti topi ketu. Topi ketu yang biasa digunakan para petani ketika di sawah, digunakan oleh para perempuan setiap menggelar aksi demonstrasi, yang di dalamnya mengandung makna bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan dengan meminggirkan kaum tani. Pertanian sudah menjadi ciri khas dan tradisi di desa mereka, dan dengan demikian apa yang akan mengubah tata ruang desa mereka yang akan mengancam keberlangsungan tradisi tersebut, mestilah

ditolak. Dalam kajian ekofeminisme sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Terry Eagleton (Ponda, 2021) budaya perempuan memang digambarkan dekat dengan pertanian.

Dalam ekofeminisme, cakrawala berpikir feminisme diperluas untuk mendapatkan satu kesatuan utuh bahwa pembebasan perempuan harus diikuti dengan pembebasan alam. Dalam konteks pembebasan terhadap alam ini, teoretisi seperti Terry Eagleton berpendapat bahwa diperlukan suatu kerjasama antara perempuan dengan laki-laki. Dengan kalimat lain, perempuan tidak akan bisa menyelamatkan bumi tanpa bantuan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Kerjasama itu diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri di bumi (Ponda, 2021). Dalam konteks artikel ini, para perempuan pun bekerja sama dengan para laki-laki untuk menyelamatkan lingkungan dan alam dari pembangunan yang dinilai akan menghadirkan kerusakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Perjuangan perempuan di Indramayu didasarkan karena adanya kesadaran bahwa pembangunan yang akan berlangsung di desa mereka akan berdampak buruk pada lingkungan dan menghancurkan ruang hidup mereka. Mereka pun ingin melihat negara yang diposisikan bersebrangan dengan mereka, dapat “mengakui” dan melihat kehadiran mereka, mengingat pembangunan PLTU 2 dianggap tidak melibatkan mereka dalam prosesnya, dan mengabaikan hak-hak mereka. Saran untuk penelitian selanjutnya, akan lebih menarik ketika membahas gerakan dengan sudut politik kewargaan secara komprehensif (redistribusi, rekognisi dan partisipasi).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih secara khusus kepada semua pihak yang membantu penelitian dalam artikel ini, seperti Jatayu, WALHI Jawa Barat. Penulis pun mengucapkan terimakasih kepada Jurnal Ilmiah Muqoddimah yang berkenan menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresswel, J. W. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Cusdiawan. (2020). Membedah Gerakan Subaltern dalam Melawan Pembangunan PLTU di Indramayu. In *PMB LIPI, Volume 11, Nomor 21*. <https://pmb.lipi.go.id/membedah-gerakan-subaltern-dalam-melawan-pembangunan-pltu-di-indramayu/>
- Fraser, N. (2005). Mapping The Feminist Imagination: From Redistribution to Recognition to Representation. *Constellations*, 12 (3), 295–307.
- Hendrastiti, T. K. (2019). Tutar Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan. *Jurnal Perempuan*, 24 No.1, 6–28.
- Honneth, A. (1995). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict*. The MIT Press.
- Kladermans, B. (2005). *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Magdoff, F., & Foster, J. B. (2018). *Lingkungan Hidup dan Kapitalisme: Sebuah Pengantar* (Terjemahan). Marjin Kiri.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Ponda, A. (2021). *Asal-usul Ekofeminisme: Budaya Patriarki dan Sejarah Feminisasi Alam* (1 ed.). Cantrik Pustaka.
- Porta, D. Della. (2014). Social Movement Studies and Methodological Pluralism: An Introduction. In D. Della Porta (Ed.), *Methodological Practices in Social Movements Research*. Oxford University Press.
- Pratiwi, A. M., & Boangmanalu, A. G. (2019). Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi. *Jurnal Perempuan*, 24 (4), 143–169.
- Priyatna, A., Subekti, M., & Rachman, I. (2017). Ekofeminisme dan Gerakan Perempuan di Bandung. *Patanjala*, 9 (3), 439–454.
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari Pembangunan. Terjemahan Hira Jhamtani*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



- Sudrajat. (2015). *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya bagi Manusia dan Lingkungan*. Gajah Mada University Press.
- Susilowati, L., & Ismoyo, P. J. (2019). Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah. *Jurnal Perempuan*, 24 (1), 128–147.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2007). *Contentious Politics*. Paradigm Publisher.
- WALHI Jawa Barat. (2020). Pemerintah Jepang Harus Stop Dukung PLTU Indramayu 2. In *walhijabar.id*. <https://walhijabar.id/pemerintah-jepang-harus-stop-dukung-pltu-indramayu-2/>